

Kompas

May 13, 2008

Print & Online

Perluasan Lahan Kebun Sawit Dibatasi

Jakarta, Kompas - Perluasan kebun kelapa sawit, yang disorot organisasi lingkungan internasional karena dampak sosial dan lingkungannya, dibatasi dengan memanfaatkan lahan telantar. Meski demikian, beberapa kasus pembukaan hutan untuk kebun baru atas izin pemerintah daerah terungkap di lapangan, seperti laporan Greenpeace Asia Tenggara di kawasan Riau.

"Dulu mungkin ada, tetapi sekarang tidak masuk hutan lagi. Hanya dikembangkan di luar kawasan hutan," kata Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Didiek Hadjar Goenadi di sela-sela acara Seminar Perubahan Iklim, Pertanian, dan Perdagangan, yang diselenggarakan Dewan Kebijakan Perdagangan Pangan dan Pertanian Internasional (IPC) dan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) di Bogor, Senin (12/5).

Di tengah dialog perubahan iklim global, perkebunan kelapa sawit disorot karena melibatkan pembukaan hutan besar-besaran yang berakibat pelepasan karbon dioksida, unsur utama pembentuk gas rumah kaca.

Tingginya harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar dunia dinilai berperan pada pembukaan hutan. "Para pendatang baru mungkin lupa dengan ketentuan itu," kata Didiek. Sebagian pendatang baru merupakan anggota Gapki (total anggotanya 267 perusahaan). Namun, Gapki tak bisa memberikan sanksi. Alasannya, prinsip produksi kelapa sawit berkelanjutan, seperti ketentuan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang belum lama disepakati. "Kami terus menyosialisasikan agar anggota mematuhi prinsip RSPO," katanya.

Data terakhir, dari luas kebun kelapa sawit 6,2 juta hektar (ha), 3,5 juta ha di antaranya dikuasai anggota Gapki. Total produksi CPO, 17 juta ton.

Menurut Didiek, pembukaan lahan baru kelapa sawit diarahkan pada lahan telantar bekas HPH, total luas sekitar 7 juta ha.

Sejumlah pembicara kemarin menyatakan, tingginya permintaan pangan dan energi mengancam keutuhan hutan karena butuh lahan baru. Solusi ilmu pengetahuan amat diharapkan.

Robert Thompson dari Agricultural Policy University of Illinois at Urbana-Champaign menyatakan, pemerintah dan swasta harus bahu-membahu mengembangkan penelitian, seperti pertanian adaptif, di mana jenis tanaman pangan dapat tumbuh di lahan tertentu, seperti kedelai di padang rumput Brasil. Menurut dia, pada masa depan dibutuhkan produksi pangan dengan produksi berlipat-lipat dari lahan sempit dan konsumsi air minim. (GSA)